



Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KATA PENGANTAR

Dinas Pertanian dalam menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) memuat pencapaian dalam pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2024. Laporan ini disusun untuk melihat keberhasilan, serta upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian sebagai sarana dalam melakukan penilaian kinerja untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

Sumber, Februari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon



Dr. Alex Suheriyawan, S.H., M.Pd.I
Pembina Tk.I

NIP. 19750710 200801 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanian memiliki 1 sasaran strategis, sedangkan urusannya ada dua yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Anggaran yang dimiliki sebesar Rp 64.902.306.978 dengan realisasi sejumlah Rp 61.353.886.768 atau 94,53%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp 3.548.420.210.

Pencapaian efisiensi anggaran hampir semua kegiatan mencapai efisiensi, sedangkan kegiatan yang tidak mencapai efisiensi yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan sebagian kendaraan dinas sudah ditarik oleh BKAD sesuai dengan aturan maka dari itu kami tidak merealisasikan anggaran sesuai yang sudah direncanakan.

Capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 79,08% dari target Renstra Tahun 2024 sebesar 588.788 ton yang terealisasi sebesar 465.621,78 ton. Jika dilihat dari perbandingan produksi untuk komoditas unggulan antara produksi di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional menunjukkan hasil sebesar: (1) produksi komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon sebesar 460.738 ton; (2) Propinsi Jawa Barat sebesar 6.139.690 ton; (3) Produksi Nasional sebesar 39.183.463 ton.

Faktor yang menyebabkan produksi naik atau turun terhadap produksi Tahun lalu yaitu:

- a) Beras produksinya turun jika dibandingkan Tahun 2023, disebabkan karena (1) luas tanam menurun akibat luas panen menurun sehingga produksi menurun; (2) produktivitas menurun hal ini disebabkan pada pertengahan di Tahun 2023 sampai dengan pertengahan 2024 terjadi elnino (kemarau panjang) disamping itu penurunan alokasi pupuk bersubsidi menyebabkan penurunan produktivitas.
- b) Bawang merah produksinya turun disebabkan karena (1) luas tanam menurun sehingga mempengaruhi ke luas panen dan produksi, (2) pengaruh cuaca menyebabkan timbulnya hama dan penyakit (layu fusarium, antarks nos, dan bakteri).

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

- c) Cabai besar mengalami peningkatan produksi karena (1) luas tanam meningkat sehingga produksi meingkat; (2) produktivitas meningkat sehingga produksi meningkat.
- d) Mangga produksinya meningkat disebabkan oleh oleh produktivitas mengalami peningkatan sehingga meningkatkan produksi.
- e) Gula menunjukkan peningkatan produksi dari Tahun 2023 disebabkan (1) produktivitas meningkat; (2) luas area tanam bertambah.
- f) Daging unggas lokal produksinya menurun jika dibandingkan Tahun 2023, disebabkan karena adanya pengurangan pemeliharaan unggas di akhir tahun berkaitan dengan cuaca kurang mendukung yang berdampak dengan kematian ternak.
- g) Daging domba mengalami peningkatan disebabkan peningkatan hewan kurban di Tahun 2024 sehingga mendukung peningkatan produksi.

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil 71,05 dengan kategori predikat **BB (Sangat Baik)**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	6
1.3 Isu-Isu Strategis.....	9
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	11
1.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023...	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	33
3.3 Realisasi Anggaran.....	33
3.4 Inovasi.....	39
BAB IV PENUTUP.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	41

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Peta jabatan.....	6
1.2	Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan dan jenis Kelamin Tahun 2024.....	11
1.3	Distribusi jenjang pendidikan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	13
1.4	Distribusi jenjang pendidikan PPPK di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	13
1.5	Distribusi jenjang pendidikan tenaga honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	13
1.6	Distribusi PNS menurut pangkat/golongan.....	14
1.7	Distribusi PPPK menurut pangkat/golongan.....	14
1.8	Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian.....	14
1.9	Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024.....	15
1.10	Tindak lanjut laporan kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023	15
2.1	Sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian.....	17
2.2	Target sasaran di Rencana Strategis Tahun 2019-2024.....	17
2.3	Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian.....	18
2.4	Strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian.....	19
2.5	Target Renstra Tahun 2024.....	23
2.6	Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2024.....	24
3.1	Skala nilai peringkat kinerja.....	27
3.2	Target sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2024.....	27
3.3	Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Kerja Tahun 2021-2024.....	28
3.4	Perbandingan realisasi Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dan Nasional.....	31
3.5	Pelayanan di Dinas Pertanian.....	33
3.6	Capaian kegiatan di Dinas Pertanian.....	33

DAFTAR GAMBAR

1.1. <i>Cascading Kinerja</i> Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	3
1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	5
3.1. Capaian kinerja Tahun 2024.....	28
3.2. Perbandingan realisasi komoditas unggulan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	29
3.3. Perbandingan capaian komoditas unggulan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	29
3.5. Konsep SIMTANI.....	39
3.6. Aplikasi SIMTANI.....	39

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk suatu pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon kepada publik, yang merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 atas penggunaan anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan penyusunan laoprannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud:

- a. Menyampaikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024;
- b. Mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian selama Tahun 2024;
- c. Bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian di Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 bertujuan untuk:

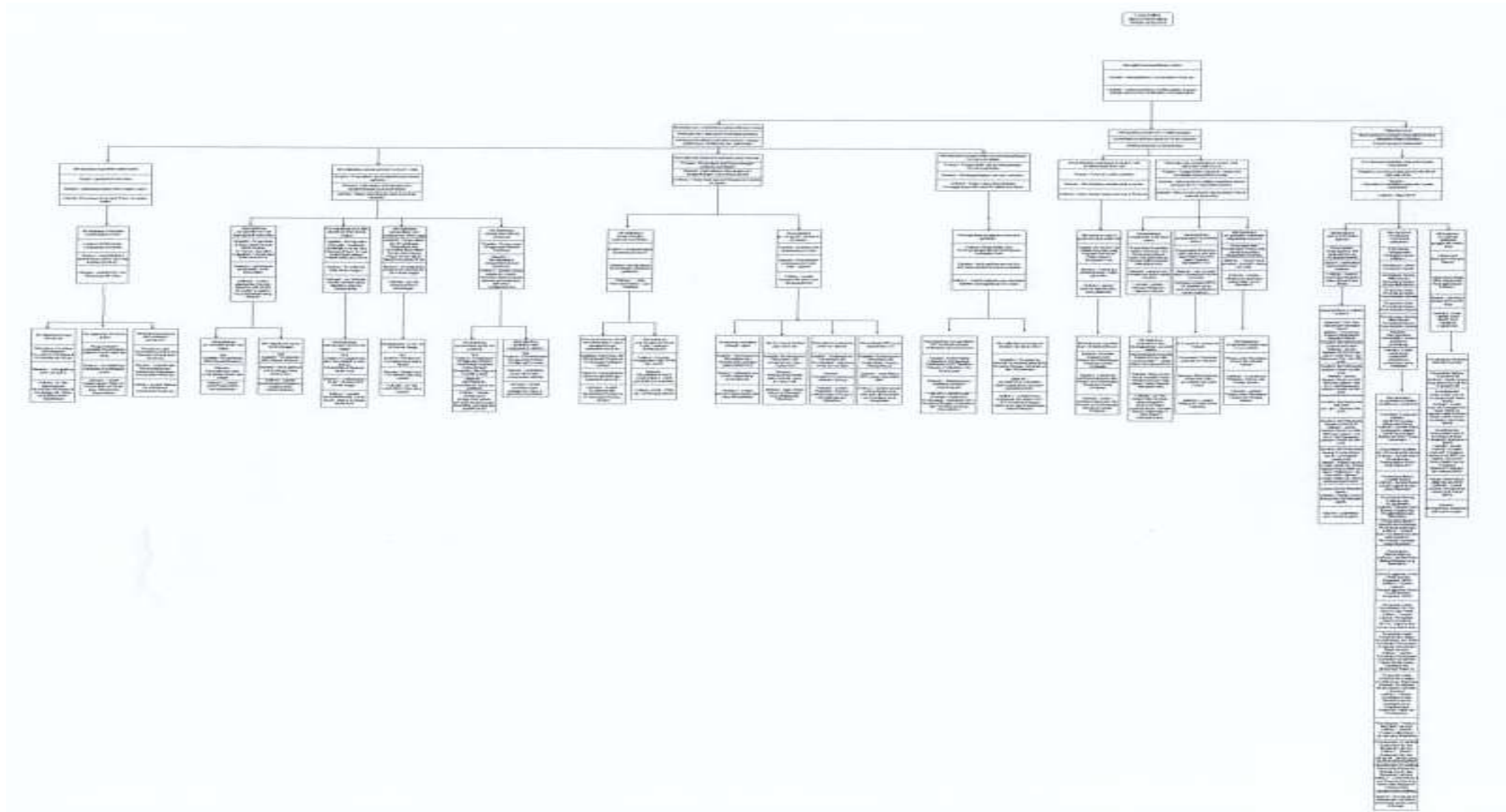
- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Mendorong Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kontribusi Dinas Pertanian untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Cirebon mengusung misi keempat yaitu “**MAJU**”. Misi keempat dalam dokumen perubahan RPJMD yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah. Misi keempat yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu daam Peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

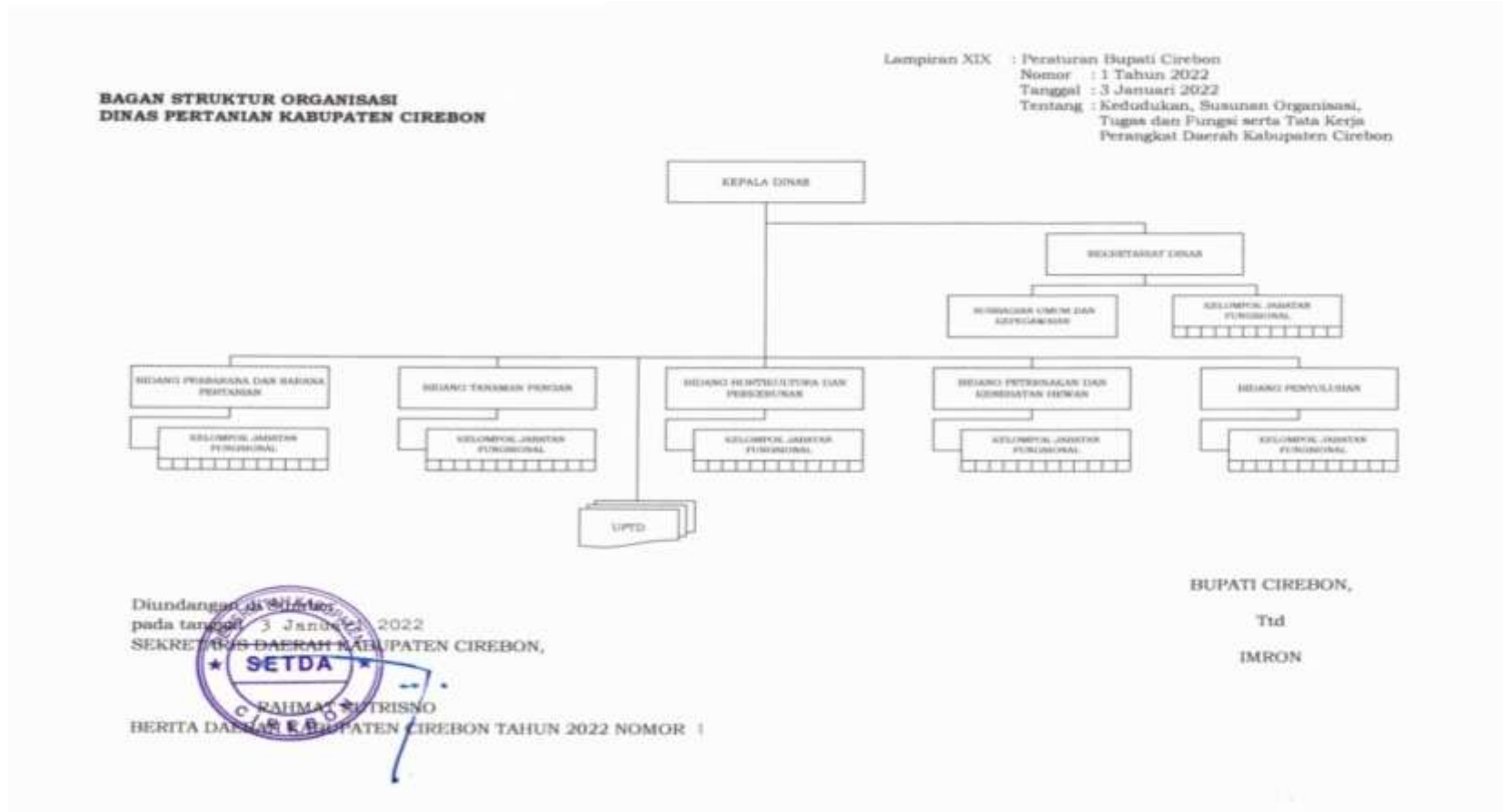
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Untuk struktur organisasi Dinas Pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Merujuk pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas **membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.**

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Dinas Pertanian memiliki fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian membagi jabatan kedalam dua komposisi yaitu:

Tabel 1.1. Peta jabatan

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas Pertanian	1. Di bawah Sekretaris Dinas Pertanian
2. Sekretaris Dinas Pertanian	a) JF Perencana Ahli (Pertama, Muda, Madya)
a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	b) JF Pranata Komputer (Terampil, Ahli Pertama)
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	c) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli (Pertama, Muda, Madya)
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan	d) Penelaah Teknis Kebijakan
5. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	e) Pengolah Data dan Informasi
6. Kepala Bidang Penyuluhan	g) Pengadministrasi Perkantoran
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2. Di bawah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani	a) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

<p>a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani</p> <p>9. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug</p> <p>10. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi</p> <p>11. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan</p> <p>11. Kepala UPTD Pasar Hewan</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan</p>	<p>b) Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>c) Pengolah Data dan Informasi</p> <p>d) Pengadministrasi Perkantoran</p> <p>e) Operator Layanan Operasional</p> <p>f) Pengelola Umum Operasional</p> <p>3. Di bawah Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>a) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya)</p> <p>b) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya)</p> <p>c) Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>d) Pengelola Layanan Operasional</p> <p>e) Operator Layanan Operasional</p> <p>f) Pengadministrasi Perkantoran</p> <p>g) Pengelola Umum Operasional</p> <p>4. Di bawah Kepala Bidang Tanaman Pangan</p> <p>a) JF Pengawas Benih Tanaman Ahli (Pertama, Muda)</p> <p>b) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya)</p> <p>c) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya)</p> <p>d) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli (Pertama, Muda)</p> <p>e) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli (Pertama, Muda, Madya) dan Pelaksana Pemula</p> <p>f) Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>g) Pengelola Layanan Operasional</p> <p>h) Pengadministrasi Perkantoran</p> <p>5. Di bawah Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>a) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya) dan Pelaksana</p> <p>b) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli (Pertama, Muda, Madya)</p> <p>c) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli (Pertama)</p> <p>d) Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>e) Pengelola Layanan Operasional</p> <p>f) Pengadministrasi Perkantoran</p> <p>g) Pengolah Data dan Informasi</p> <p>6. Di bawah Kepala Bidang Penyuluhan</p> <p>a) Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>b) Pengolah Data dan Informasi</p>
--	---

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

	<p>c) Pengelola Layanan Operasional d) Penyuluh Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya, Utama), Penyelia, Mahir, dan Terampil</p> <p>7. Di bawah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>a) JF Medik Veteriner Ahli (Pertama, Muda, Madya) b) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli (Pertama, Muda, Madya) c) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli (Pertama, Muda, Madya) d) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya) dan Pelaksana e) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli (Pertama, Muda, Madya) f) JF Paramedik Veteriner (Penyelia dan Pelaksana Lanjutan) g) Penelaah Teknis Kebijakan h) Pengolah Data dan Informasi i) Pengelola Layanan Operasional</p> <p>8. Di bawah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani</p> <p>a) JF Medik Veteriner Ahli (Pertama, Muda, Madya) b) JF Paramedik Veteriner (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) c) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli (Pertama, Muda, Madya), Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia d) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli (Pertama, Muda, Madya), Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia</p> <p>9. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani</p> <p>a) Pengolah Data dan Informasi b) Pengelola Layanan Operasional c) Pengelola Umum Operasional</p> <p>10. Di bawah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug</p> <p>a) JF Medik Veteriner Ahli (Pertama, Muda, Madya), b) JF Paramedik Veteriner penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana c) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli (Pertama, Muda, Madya), penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana d) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli (Pertama, Muda, Madya), penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana</p> <p>11. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug</p> <p>a) Pengolah Data dan Informasi b) Pengelola Umum Operasional c) Operator Layanan Operasional</p>
--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

	<p>12. Di bawah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi</p> <p>a) JF Medik Veteriner Ahli (Pertama, Muda, Madya)</p> <p>b) JF Paramedik Veteriner (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia)</p> <p>c) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli (Pertama, Muda, Madya), Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia</p> <p>d) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli (Pertama, Muda, Madya), Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia</p> <p>13. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi</p> <p>a) Operator Layanan Operasional</p> <p>b) Pengadministrasi Perkantoran</p> <p>14. Di bawah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan</p> <p>a) JF Medik Veteriner Ahli (Pertama, Muda)</p> <p>b) JF Paramedik Veteriner (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan)</p> <p>15. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan</p> <p>a) Pengolah Data dan Informasi</p> <p>b) Pengelola Umum Operasional</p> <p>c) Operator Layanan Operasional</p> <p>16. Di bawah Kepala UPTD Pasar Hewan</p> <p>a) JF Medik Veteriner Ahli (Pertama, Muda)</p> <p>b) JF Paramedik Veteriner (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan)</p> <p>c) JF Pengawas Bibit Ternak (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia)</p> <p>17. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan</p> <p>a) Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>b) Pengelola Umum Operasional</p> <p>c) Operator Layanan Operasional</p>
--	--

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi mampu menemukenalkan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian antara lain:

1. Alokasi pupuk bersubsidi (terutama NPK) dari Pemerintah Pusat lebih rendah daripada usulan/E-RDKK;
2. Terdapat beberapa kejadian di mana distributor lambat mengirimkan pupuk bersubsidi ke kios saat petani membutuhkan;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

3. Wilayah penangkaran benih padi mengalami kekeringan pada setiap musim kemarau sehingga petani kesulitan air, serta merupakan wilayah endemis OPT;
4. Proses klaim dan pembayaran dana klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berlangsung lama;
5. Tidak adanya transparansi laporan kegiatan dan anggaran ke Dinas Pertanian mengenai hasil budidaya tanaman di TTP Sedong;
6. Sewa lahan TTP Sedong setiap tahun memerlukan anggaran yg besar;
7. Banyaknya kawin berulang pada pelaksanaan IB yang disebabkan dengan gangguan reproduksi pasca PMK sehingga jumlah ternak yang terlayani berkurang berkaitan dengan jumlah semen beku yang tersedia;
8. Sarana dan prasarana kurang menunjang berkaitan dengan kapasitas kandang dan jumlah pakan yang kurang dibandingkan dengan jumlah populasi ternak yang dipelihara;
9. Sarana dan prasarana RPH belum sesuai dengan persyaratan NKV, Pengolahan limbah yang belum sesuai standar baku mutu air limbah;
10. Status Kabupaten Cirebon masih merupakan daerah tertular penyakit PHMS seperti PMK;
11. Penerapan lalu lintas hewan dan produk hewan belum memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
12. Mayoritas petani belum memahami cara pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura dan perkebunan secara terpadu.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

1. Melakukan re-alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan berdasarkan capaian realisasi penyaluran;
2. Melakukan himbauan kepada distributor agar cepat melakukan pengiriman pupuk bersubsidi ke kios saat kios telah memesan dan melakukan pembayaran kepada distributor;
3. Mengusulkan penyediaan sumur pantek dan pestisida di wilayah penangkaran benih padi;
4. Melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PT Jasa Asuransi Indonesia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Kementrian Pertanian untuk Percepatan Proses klaim AUTP;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

5. Permintaan laporan kegiatan kepada staf TTP;
6. Diskusi dengan pihak desa terkait tukar guling lahan TTP Sedong agar lahan tersebut menjadi milik dinas pertanian;
7. Melaksanakan pengobatan pada ternak yang masih memungkinkan di obati, Membatasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak yang masih mengalami gangguan reproduksi;
8. Pengurangan jumlah populasi ternak aset yang sudah tidak produktif yang di pelihara di Balai Pengembangan Bibit Peternakan;
9. Berupaya menerapkan proses produksi di RPH sesuai dengan NKV dan Halal dengan keterbatasan sarana dan prasarana, Melakukan kajian UKL-UPL dan Pertek Air Limbah terhadap operasional RPH;
10. Melakukan vaksinasi, pengobatan, KIE, desinfeksi dan investigasi;
11. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada peternak dan pelaku usaha terkait penerapan lalu lintas hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis;
12. Mengusulkan adanya pendampingan, pelatihan, Sekolah Lapang dan bimtek tentang pengendalian hama secara terpadu dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM petani;

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pertanian dalam menjalankan tugasnya didukung oleh ASN dan tenaga honorer. Jumlah masing-masing yaitu PNS 174 orang, PPPK 91 orang, dan tenaga honorer 92 orang (Data per 31 Desember 2024).

Tabel 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan dan jenis kelamin Tahun 2024

No	Jabatan	Pegawai yang ada (Orang)		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	Struktural:				
	Eselon I	0			
	Eselon II	1	S3	1	0
	Eselon III	5	S1, S2, S3	4	1
	Eselon IV	11	S1, S2	9	2
2	Pengawas Bibit Ternak	3	S1	2	1
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3	S1	2	1
4	Pengawas Benih Tanaman	2	S1, S2	2	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

5	Pengawas Mutu Pakan	3	S1, S2	2	1
6	Penyuluh Pertanian	97	SMA, D3, S1, S2	57	40
7	Arsiparis	0	0	0	0
8	Bendahara	0	0	0	0
9	Medik Veteriner	8	S1, S2	2	6
10	Paramedik Veteriner	13	D3	6	7
11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	SMA	1	0
12	Pengadministrasi Umum	5	SMA	5	0
13	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	1	S1	1	0
14	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	0	0	0	0
15	Pengelola Akuntansi	1	SMA	0	1
16	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1	D3	0	1
17	Pengelola Keuangan	4	SMA	2	2
18	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1	SMA	1	0
19	Pengelola Rumah Potong Hewan	1	SMA	1	0
20	Pengelola Teknologi Perbenihan	1	D3	0	1
21	Pengolah Data	1	S1	1	0
22	Verifikator Keuangan	1	SMA	1	0
23	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	1	S1	1	0
24	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	S2	0	1
25	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1	S2	1	0
26	Perencana Ahli Muda	1	S1	0	1
27	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1	S1	1	0
28	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1	S1	0	1
29	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	S1	1	2
30	Pengawas Pupuk dan Pestisida	1	S1	0	1
		174		104	70

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Sedangkan latar belakang pendidikan untuk PNS, PPPK, dan tenaga honorer dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Tiga (S3) yang tersaji pada tabel-tabel dibawah ini

Tabel 1.3. Distribusi jenjang pendidikan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	2		2
2	S2	6	13	19
3	S1/D4	62	31	93
4	D3	7	15	22
5	SMA/SLTA	24	11	35
6	SMP/SLTP	2		2
7	SD	1		1
	Jumlah	104	70	174

Tabel 1.4. Distribusi jenjang pendidikan PPPK di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1	34	19	53
2	D3	7	0	7
3	D2	1	0	1
4	SMA/SLTA	27	3	30
	Jumlah	69	22	91

Tabel 1.5. Distribusi jenjang pendidikan tenaga honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2		1	1
2	S1	14	23	37
3	D3	3	1	4
4	SMA/SMK/SLTA	31	2	33
5	SMP	8		8
6	SD	8	1	9
	Jumlah	64	28	92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Berdasarkan golongan ASN Dinas Pertanian memiliki komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.6. Distribusi PNS menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0	1	1
2	Pembina Tk.I, IV/b	6	0	6
3	Pembina, IV/a	10	5	15
4	Penata Tk.I, III/d	22	10	32
5	Penata, III/c	4	3	7
6	Penata Muda Tk.I, III/b	14	13	27
7	Penata Muda, III/a	20	17	37
8	Pengatur Tk.I, II/d	2	1	3
9	Pengatur, II/c	7	13	20
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	11	3	14
11	Pengatur Muda, II/a	6	4	10
12	Juru Tk.I, I/d	2	0	2
	Jumlah	104	70	174

Tabel 1.7. Distribusi PPPK menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IX	34	19	53
2	VII	7	0	7
3	VI	1	0	1
4	V	27	3	30
	Jumlah	69	22	91

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon antara lain:

Tabel 1.8. Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024
	ASET TETAP	
1.3.01	Tanah	8.597.930.932
1.3.02	Peralatan dan Mesin	15.020.172.071,93
1.3.03	Gedung dan Bangunan	31.920.850.557,79
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.492.026.110

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.133.678.500
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(22.351.966.023,93)
Jumlah Aset Tetap		36.812.692.147,79
ASET LAINNYA		
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	47.420.000
1.5.04	Aset Lain-Lain	3.108.166.633,29
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(43.636.000)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.231.322.696,36)
Jumlah Aset Lainnya		1.880.627.936,93

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pertanian mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp 64.902.306.978 dengan realisasi sejumlah Rp 61.353.886.768 atau 94,53%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp 3.548.420.210. Berikut rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.9. Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.662.566.800	1.662.566.800	1.433.453.359
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.662.566.800	1.662.566.800	1.433.453.359
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.662.566.800	1.662.566.800	1.433.453.359
5.	BELANJA DAERAH	41.920.908.650	64.902.306.978	61.353.886.768
5.1	BELANJA OPERASI	41.920.908.650	64.006.759.978	60.487.147.198
5.1.01	Belanja Pegawai	35.096.243.000	36.692.743.000	35.413.978.878
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.824.665.650	9.038.541.978	8.153.668.474
5.1.05	Belanja Hibah	0	18.275.475.000	16.919.499.846
5.2	BELANJA MODAL	309.328.000	895.547.000	866.739.570
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.878.000	555.097.000	527.704.570
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	100.000.000	99.526.850
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.450.000	240.450.000	239.508.150

Dinas Pertanian hanya mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon saja, tidak mengelola anggaran yang bersumber dari APBN ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.

1.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut dari hasil evaluasi laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yaitu:

Tabel 1.10. Tindak lanjut laporan kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023

No	Uraian	Keterangan
A.	PERENCANAAN KINERJA	
1	-	
B.	PENGUKURAN KINERJA	
2	Membuat SOP yang menjelaskan mekanisme penyusunan Laporan AKIP	Sudah ditindaklanjuti
C.	PELAPORAN KINERJA	
3	-	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan pernyataan pimpinan bahwa telah direviu secara internal, formulir checklist reviu dan SK Tim Reviu Internal	Sudah ditindaklanjuti

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanian yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Visi Dinas Pertanian mengacu dari Visi Bupati Cirebon, hal ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melaksanakan misi ke empat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu “*Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah*”.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pertanian, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis (Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan)	- Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan

Tabel 2.2. Target sasaran di Rencana Strategis Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Renstra 2019-2024								
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan,	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan,	Ton	468.478	506.686	517,162	548.414	588.778

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

	hortikultura dan peternakan)	hortikultura dan peternakan						
--	------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakannya dapat dilihat pada (Tabel 2.3.)

Tabel 2.3. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)	1.	Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier
2	Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon	2.1	Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
		2.2	Revitalisasi mangga gedong gincu
		2.3	Melakukan pengembangan perbibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan	3	Meningkatkan frekuensi penyuluhan mendukung pertanian ramah lingkungan
4	Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta akademisi	4	Melaksanakan kajian yang berkaitan dengan sektor pertanian
5	Mendorong upaya transfer IPTEK menuju pertanian terpadu dan keberlanjutan	5.1	Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi
		5.2	Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial
6	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten	6.1	Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan/rehabilitasi/sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi supaya berfungsi optimal
7	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan	7.1	Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk petani di wilayah LP2B
		7.2	Menyiapkan demplot untuk menyediakan benih unggul tahan banjir dan kekeringan
8	Menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan	8	Menyiapkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk mendorong pengembangan sektor pertanian
9	Meningkatkan pengawasan peredaran hewan/tanaman dan bahan asal hewan/tanaman	9	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices, dan Good Manufacturing Practices)

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pertanian melaksanakan 2 urusan Pemerintahan yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan; dan (2)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Tabel 2.4. Strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan)	1. Urusan Pertanian		
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Ø Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
				Ø Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
			Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
			Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Ø Pemanfaatan SDG hewan/tanaman
				Ø Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
				Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

				Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
				Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Ø Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2 B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2 B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Ø Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
				Ø Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
			Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Ø Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Ø Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
				Ø Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa
				Ø Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
		2. Non Urusan Pertanian		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ø Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
				Ø Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
				Ø Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
				Ø Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
				Ø Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
				Ø Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				Ø Evaluasi kinerja perangkat daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

			Administrasi keuangan perangkat daerah	Ø Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				Ø Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
				Ø Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Ø Pengamanan barang milik daerah SKPD
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Ø Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
			Administrasi umum perangkat daerah	Ø Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Ø Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				Ø Penyediaan bahan logistik kantor
				Ø Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				Ø Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Ø Penyediaan bahan/material
				Ø Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Ø Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Ø Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

				Ø Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
				Ø Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				Ø Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Tabel 2.5. Target Renstra Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, horikultura dan peternakan	ton	588.778

Pada bulan Oktober 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melaksanakan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan dokumen pelaksanaan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Tabel 2.6. Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, horikultura dan peternakan	ton	461.680

Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume dan anggaran bertambah dari semula Rp 42.230.236.650 menjadi Rp 64.902.306.978

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- e-SAKIP Reviu adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



- Aplikasi beralamatkan <https://simonek.cirebonkab.go.id/> merupakan aplikasi yang dimiliki Kabupaten Cirebon yang digunakan sebagai sarana pelaporan kinerja setiap SKPD tiap bulan untuk mengetahui sudah sejauh mana dalam melakukan program/kegiatan dan penggunaan anggaran.

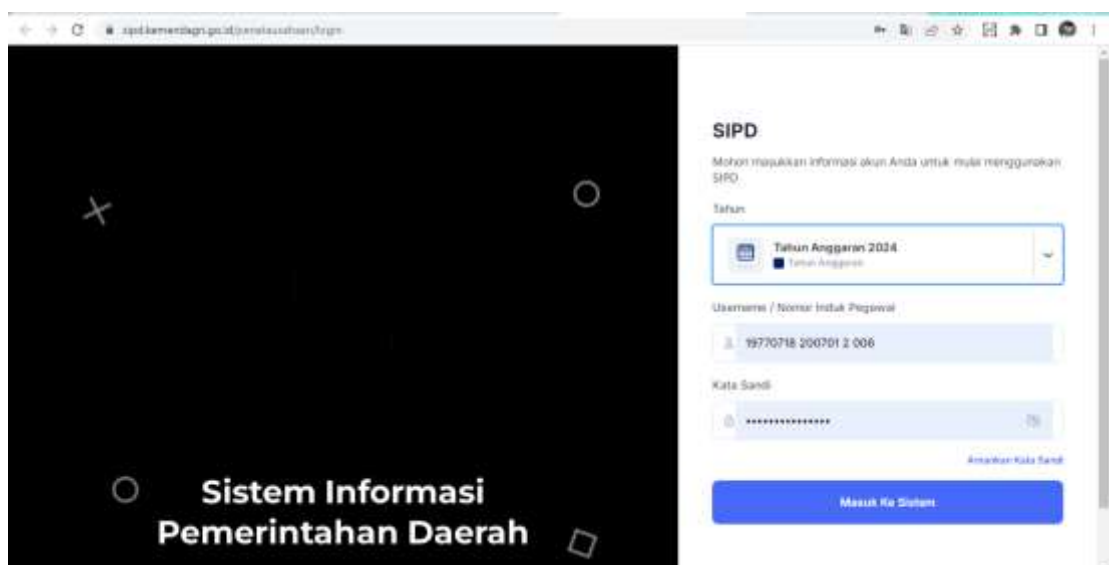


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

- c. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memiliki aplikasi e-Sakip yang merupakan suatu sistem untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon.

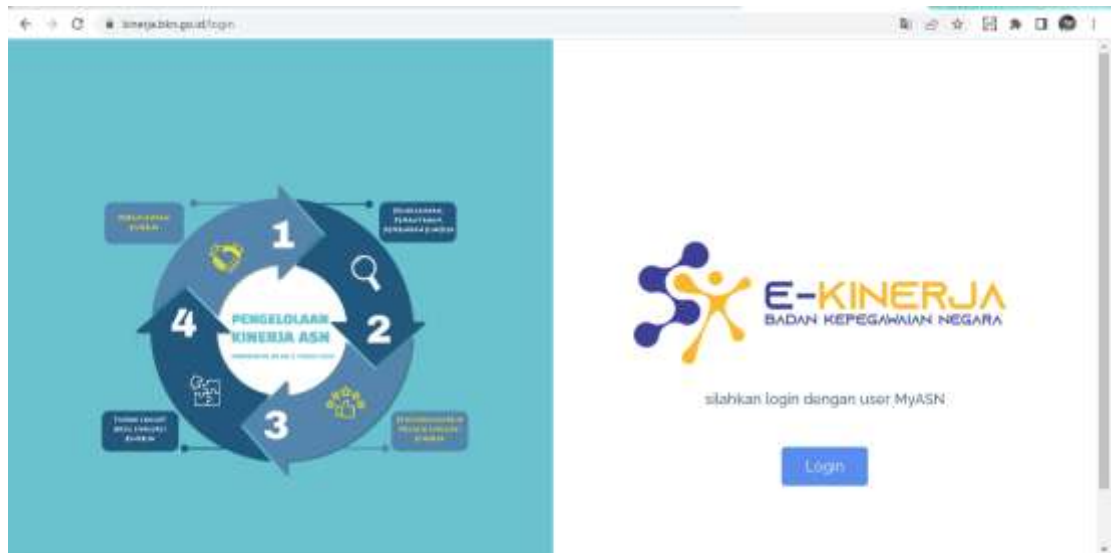


- d. SIPD Kemendagri adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SIPD ini merupakan aplikasi berbasis elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan data pemerintahan daerah. Alamatnya yaitu (<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login>)



- e. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Alamat websitenya adalah (<https://kinerja.bkn.go.id/login>).

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



- f. E-perencanaan atau e-planning adalah sistem informasi perencanaan yang menggunakan teknologi untuk membantu menyusun rencana pembangunan daerah. E-planning dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah. Seperti Bappeda, SKPD, DPRD, dan kepala daerah. Alamat websitenya (<https://perencanaan.cirebonkab.go.id/>)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dalam pengukuran capaian kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di Dinas Pertanian.

Tabel 3.1. Skala nilai peringkat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	506.686	517.162	548.414	588.788

Dokumen rencana strategis disusun untuk tahun 2019-2024 namun dalam pelaksanaannya ada peraturan terbaru yang mengatur mengenai nomenklatur program dan kegiatan yaitu Permendagri nomor 90 Tahun 2019 maka dilakukan perubahan Renstra 2019-2024. Pada saat penyusunan perubahan Renstra asumsi yang digunakan adalah asumsi optimis dimana

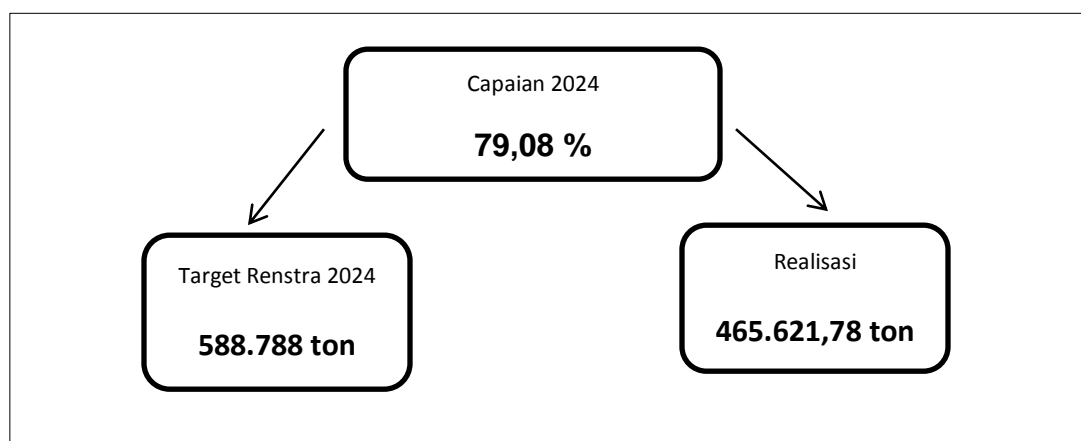
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

semua kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi tercukupi sehingga target produksi seperti tertuang pada Tabel 3.2. namun apabila sarana dan prasarana produksi sesuai dengan kondisi yang ada maka target produksi pada rencana kerja (Renja) setiap tahunnya disesuaikan dengan potensi yang ada seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Kerja Tahun 2021-2024

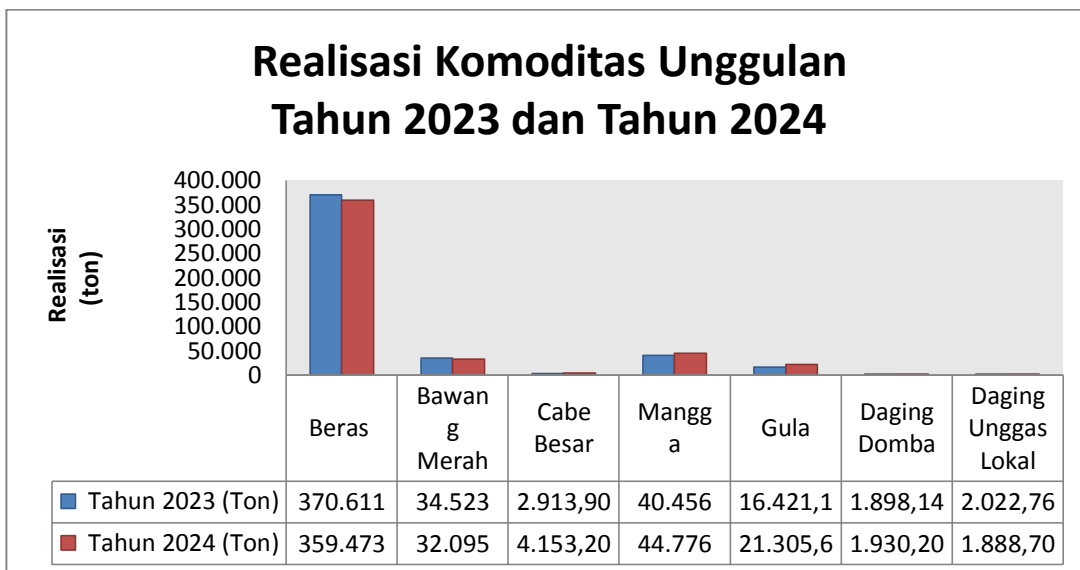
No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	480.388	483.953	487.605	461.680

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rinciannya sebagai berikut:

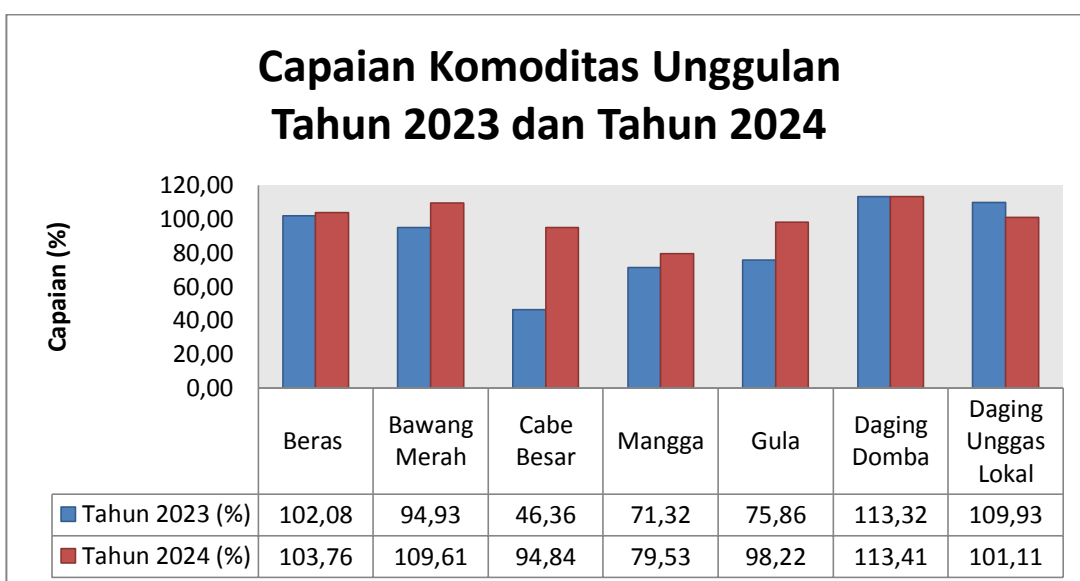


Gambar 3.1. Capaian kinerja Tahun 2024

Pencapaian target sasaran Dinas Pertanian untuk Tahun 2024 sebesar 588.788 ton, dan realisasinya sebesar 467.141,95 ton atau tercapai 79,34%. Sehingga capaian kinerja ini dikatakan tercapai, dan memiliki penilaian kinerja capaian sasaran strategis yang **“Tinggi”**.



Gambar 3.2. Perbandingan realisasi komoditas unggulan Tahun 2023 dan Tahun 2024



Gambar 3.3. Perbandingan capaian komoditas unggulan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Hasil data Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa:

1. Pada sektor tanaman pangan (beras) menunjukkan penurunan di Tahun 2024 dari tahun 2023. Pada tahun 2024 hanya memproduksi sebesar 359.473 ton sedangkan di Tahun 2023 sebesar (370.611 ton). Penurunan produksi ini **disebabkan** (1) luas tanam menurun akibat luas panen menurun sehingga produksi menurun; (2) produktivitas menurun hal ini disebabkan pada pertengahan di Tahun 2023 sampai dengan pertengahan 2024 terjadi elnino (kemarau panjang) disamping itu penurunan alokasi pupuk bersubsidi menyebabkan penurunan produktivitas. **Rencana tindak lanjut** untuk mempertahankan produksi agar tetap meningkat yaitu: (1) melakukan penyuluhan ke petani lebih intensif untuk mendorong produksi padi lebih meningkat; (2) pemberian bantuan benih; (3) pengembangan penangkaran benih untuk

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

ketersediaan; (4) memperbaiki prasarana seperti perbaikan irigasi dan penyediaan sarana pertanian sebagai pendukungnya; (5) peningkatan indeks pertanaman (IP).

2. Sektor tanaman hortikultura memiliki hasil produksi sebagai berikut:

- ❖ Pada komoditas bawang merah memiliki produksi 32.095 ton atau capaiannya sebesar (109,61%) dari target Tahun 2024 lebih kecil dari hasil produksi di Tahun 2023 (34.523 ton) atau capaiannya sebesar 94,93%. Hal ini **disebabkan** oleh: (1) luas tanam menurun sehingga mempengaruhi ke luas panen dan produksi, (2) pengaruh cuaca menyebabkan timbulnya hama dan penyakit (layu fusarium, antarks nos, dan bakteri). **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu petani diberi bantuan berupa pupuk melalui kegiatan petani Champion bawang merah.
- ❖ Pada cabai besar menunjukkan hasil produksi di Tahun 2023 2.913,9 ton atau sebesar 46,36% dari target, sedangkan di Tahun 2024 mengalami peningkatan hasil produksi sebesar 4.153,20 ton dan capaiannya sebesar 94,84 dari target yang sudah ditetapkan.. Produksi ini terjadi peningkatan, **disebabkan** karena (1) luas tanam meningkat sehingga produksi meingkat; (2) produktivitas meningkat sehingga produksi meningkat. **Rencana tindak lanjut** (1) dimonitoring secara bertahap sehingga keberlanjutan komoditas cabai bisa terus berjalan; (2) diberi bantuan pendukung berupa kegiatan P2L yang bertujuan sebagai upaya penanganan inflasi Daerah.
- ❖ Pada komoditas mangga terjadi peningkatan produksi yang sebelumnya di Tahun 2023 (40.456 ton) atau capaiannya sebesar 71,32% dari target menjadi 44.776 ton di Tahun 2024 dan capaiannya sebesar 79,53% dari target yang telah ditetapkan.. Produksi ini meningkat **dipengaruhi** oleh produktivitas mengalami peningkatan sehingga meningkatkan produksi. **Rencana tindak lanjut** (1) melakukan penangkaran benih dengan tujuan untuk meremajakan pohon-pohon yang sudah tua; (2) pada Tahun 2025 dan 2026 akan diberikan saprodi dikegiatan Upland.

3. Sektor tanaman perkebunan menunjukkan hasil produksi gula di Tahun 2023 sebesar (16.421,12 ton) atau tercapai 75,86%, dan mengalami peningkatan di Tahun 2024 sebesar 21.305,68 ton atau sebesar (98,22%). Peningkatan ini **disebabkan** (1) produktivitas meningkat; (2)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

luas area tanam bertambah. **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu melakukan penyuluhan dan binaan.

4. Pada sektor peternakan memiliki nilai produksi sebagai berikut:
 - ❖ Produksi daging unggas lokal sebesar 2.022,76 ton atau tercapai 109,93% (Tahun 2023), di Tahun 2024 mengalami penurunan produksi menjadi 1.888,70 ton dan capaiannya sebesar 101,11 dari target yang ada. **Penyebab** penurunan unggas lokal di Tahun 2024 karena adanya pengurangan pemeliharaan unggas di akhir tahun berkaitan dengan cuaca kurang mendukung yang berdampak dengan kematian ternak. **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk mempertahankan produksi tetap meningkat yaitu (1) melakukan pencegahan untuk unggas lokal dengan melakukan vaksinasi; (2) memfasilitasi bantuan ternak ke Propinsi dan Pusat untuk pembibitan ternak.
 - ❖ Pada daging domba mengalami peningkatan di Tahun 2024 sebesar 1.930,20 ton dari sebelumnya 1.898,14 ton (Tahun 2023). Hal ini **disebabkan** peningkatan hewan kurban di Tahun 2024 sehingga mendukung peningkatan produksi. **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu: melakukan budidaya dengan menerapkan IB supaya untuk memperbaiki keturunan yang dihasilkan lebih berkualitas.

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional

No	Komoditas	Kabupaten Cirebon (ton)	Jawa Barat * (ton)	Nasional * (ton)
1	Beras	359.473	5.252.742	30.895.434
2	Bawang Merah	32.095	179.355	1.982.280
3	Cabe Besar	4.153,20	138.671	395.623
4	Mangga	44.776	449.214	3.305.401
5	Tebu	16.421,92	56.000	2.271.000
6	Daging Domba	1.930,20	33.494,5	52.998,8
7	Daging Unggas Lokal	1.888,70	30.213,1	280.725,8

Ket : (*) angka sementara
Sumber : BPS, 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon ada 7 (tujuh) yaitu :

- a. Komoditas Beras, Kabupaten Cirebon memiliki data produksi di Tahun 2024 sebesar 359.473 ton. Dari Produksi Propinsi Jawa Barat (5.252.742 ton), dan produksi Nasional sebesar (30.895.434 ton). Capaian produksi beras Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 6,84%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 1,16%.
- b. Komoditas Bawang merah memiliki hasil produksi sebesar 32.095 ton di Tahun 2024, dari hasil produksi di Jawa Barat yang mencapai 179.355 ton, dan produksi Nasional mencapai 1.982.280 ton. Capaian bawang merah Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 17,89%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional sebesar 1,62%.
- c. Komoditas Cabe Besar, memiliki hasil produksi 4.153,20 ton dari produksi Jawa Barat yang mencapai 138.671 ton, dan produksi Nasional mencapai 395.623 ton. Capaian produksi cabe besar di Kabupaten Cirebon terhadap Propinsi Jawa Barat hanya 3%, sedangkan capaian produksi terhadap Nasional sebesar 1,05%.
- d. Komoditas Mangga di Kabupaten Cirebon memiliki hasil produksi sebesar 44.776 ton, sedangkan di Propinsi Jawa Barat produksinya mencapai 449.214 ton, dan produksi Nasional mencapai 3.305.401 ton. Capaian produksi mangga Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 9,97%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 1,35%.
- e. Komoditas Tebu untuk Kabupaten Cirebon memiliki produksi 16.421,92 ton di Tahun 2024, sedangkan di Propinsi Jawa Barat memiliki produksi sebesar 56 ton, dan produksi Nasional mencapai 2.271 ton. Capaian produksi tebu di Kabupaten Cirebon terhadap Propinsi Jawa Barat hanya 29,32%, sedangkan capaian produksi terhadap Nasional sebesar 0,72%.
- f. Komoditas Daging Domba produksinya mencapai 1.930,20 ton, di Propinsi Jawa Barat produksi mencapai 33.494,50 ton, dan produksi Nasional mencapai 52.998,80 ton. Capaian produksi daging domba Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 5,76%, sedangkan capaian daging domba Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 3,64%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

- g. Komoditas Daging Unggas Lokal Kabupaten Cirebon di Tahun 2024 produksinya mencapai 1.888,70 ton, produksi di Propinsi Jawa Barat mencapai 30.213,10 ton, dan produksi Nasional mencapai 280.725,80 ton. Capaian daging unggas lokal Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 6,25%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional sebesar 0,67%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Dinas pertanian memiliki beberapa pelayanan, dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilakukan oleh Dinas pertanian memiliki nilai IKM 85,07 masuk dalam katagori B (memuaskan)

Tabel 3.5. Pelayanan di Dinas Pertanian

No	Jenis Pelayanan	Sampel	Target IKM	Realisasi IKM	Mutu Layanan
1	Pelayanan Penyuluh Pertanian	100	85,00	85,07	B
2	Pelayanan Data Pertanian				
3	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak				
4	Pelayanan Pemberian Izin Usaha				

3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya ada 2 urusan, yaitu:

Tabel 3.6. Capaian kegiatan di Dinas Pertanian

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN	OUTCOME/ OUTPUT/ SUBOUTPUT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.149.142.550	38.750.956.481	1.398.186.069	96,52	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD 85,07 poin
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.816.500	561.698.860	56.117.640	90,92	Jumlah kesesuaian program dalam Renstra dan Renja 7 jenis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	567.020.700	510.958.140	56.062.560	90,11	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.212.000	3.212.000	0	100,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.726.800	2.726.800	0	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.479.600	1.479.600	0	100,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.857.000	1.857.000	0	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.226.800	4.226.800	0	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.293.600	37.238.520	55.080	99,85	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.701.275.600	35.422.498.478	1.278.777.122	96,52	Jumlah belanja urusan daerah yang difasilitasi anggarannya 2 jenis
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.692.743.000	35.413.978.878	1.278.764.122	96,51	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 278 orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.778.700	3.776.700	2.000	99,95	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.753.900	4.742.900	11.000	99,77	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD 3 laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71.426.900	71.130.340	296.560	99,58	Jumlah aset milik daerah yang dikelola (KIB) 6 jenis
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	71.426.900	71.130.340	296.560	99,58	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.384.000	96.232.500	1.151.500	98,82	Jumlah penunjang disiplin aparatur 1 jenis
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.384.000	96.232.500	1.151.500	98,82	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 200 paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.696.800	557.890.340	6.806.460	98,79	Jumlah pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi 7 jenis

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.767.700	3.767.700	0	100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.818.000	185.372.000	2.446.000	98,70	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.845.000	91.845.000	0	100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.599.900	42.599.900	0	100,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.570.000	17.846.000	3.724.000	82,74	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 4 dokumen
Penyediaan Bahan/Material	104.098.600	103.523.700	574.900	99,45	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 31 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.997.600	112.936.040	61.560	99,95	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.066.850	332.122.263	10.944.587	96,81	Jumlah Prasarana Aparatur yang dibutuhkan sesuai Standar dalam Pelayanan 4 jenis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.066.850	332.122.263	10.944.587	96,81	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.753.475.900	1.709.383.700	44.092.200	97,49	Jumlah pemeliharaan BMD sesuai Standar dalam Pelayanan 1 jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.948.000	24.948.000	0	100,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 248 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.135.000	30.221.300	37.913.700	44,36	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 248 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.950.000	19.950.000	0	100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.640.442.900	1.634.264.400	6.178.500	99,62	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

					yang Dipelihara/ Direhabilitasi 23 unit
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.518.576.180	2.300.231.426	218.344.754	91,33	Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian 0,72
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	667.891.780	589.647.372	78.244.408	88,28	Jumlah sarana pertanian (Pupuk, Pestisida, alsintan) yang terawasi peredarannya dan mutu penggunaannya 3 jenis
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	609.554.580	531.432.536	78.122.044	87,18	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 laporan
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	58.337.200	58.214.836	122.364	99,79	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 laporan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.290.730.800	1.205.041.220	85.689.580	93,36	Jumlah ketersediaan Sumber Daya Genetik (SDG) komoditas unggulan hewan/tanaman yang dikelola 7 jenis
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	985.430.800	913.279.080	72.151.720	92,68	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 dokumen
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	305.300.000	291.762.140	13.537.860	95,57	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 dokumen
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	369.104.700	350.615.122	18.489.578	94,99	Jumlah bibit ternak bermutu yang digulirkan kepada masyarakat 2 satuan ternak
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	369.104.700	350.615.122	18.489.578	94,99	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 12 laporan
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	190.848.900	154.927.712	35.921.188	81,18	Jumlah pelayanan IB per kebuntingan 2 SC
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	190.848.900	154.927.712	35.921.188	81,18	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar 12 laporan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20.191.715.572	18.526.235.076	1.665.480.496	91,75	Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian 0,57
Pengembangan Prasarana Pertanian	144.279.900	141.762.970	2.516.930	98,26	Jumlah Prasarana Pertanian yang Difasilitasi 12 jenis
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	74.447.900	72.755.970	1.691.930	97,73	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 laporan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	69.832.000	69.007.000	825.000	98,82	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 1 dokumen
Pembangunan Prasarana Pertanian	20.047.435.672	18.384.472.106	1.662.963.566	91,70	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab 72 unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	13.388.759.800	12.044.321.043	1.344.438.757	89,96	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 57 unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.906.698.600	5.868.186.698	38.511.902	99,35	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 12 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	39.932.000	39.870.818	61.182	99,85	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 0 unit
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	712.045.272	432.093.547	279.951.725	60,68	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 unit
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	919.659.876	688.672.485	230.987.391	74,88	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular (Zoonosis) 0 Satuan Ternak
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	257.169.000	225.466.170	31.702.830	87,67	Jumlah UPTD. Puskesmas yang memberikan pelayanan medik veteriner 3 unit
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	257.169.000	225.466.170	31.702.830	87,67	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 laporan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	571.678.876	378.350.155	193.328.721	66,18	Jumlah cakupan pengawasan persyaratan teknis kesmavet 2 jenis
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	571.678.876	378.350.155	193.328.721	66,18	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 laporan
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	90.812.000	84.856.160	5.955.840	93,44	Jumlah UPTD. Puskesmas yang memberikan pelayanan medik veteriner 3 unit
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	90.812.000	84.856.160	5.955.840	93,44	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 laporan

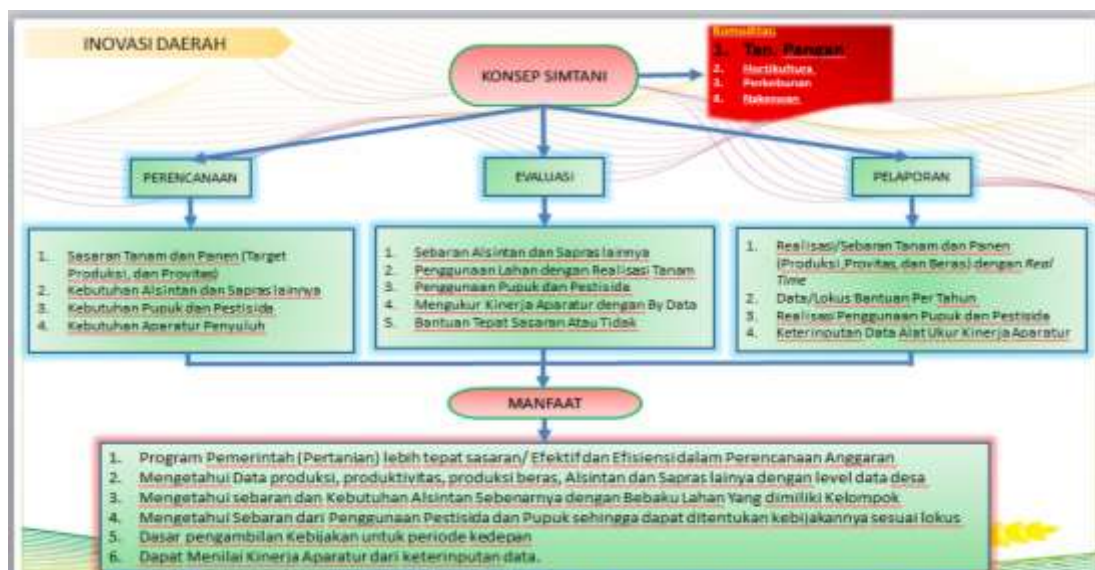
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	257.276.200	230.269.250	27.006.950	89,50	Rasio Tingkat Keberhasilan Penanggulangan Bencana Pertanian Per-Tahun 0,88
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	257.276.200	230.269.250	27.006.950	89,50	Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana 4.132 Ha
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	67.580.400	67.523.970	56.430	99,92	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1.976 Ha
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	189.695.800	162.745.280	26.950.520	85,79	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 1.052 Ha
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	64.611.900	64.113.780	498.120	99,23	Rasio Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian 0,86
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.611.900	64.113.780	498.120	99,23	Jumlah layanan rekomendasi yang difasilitasi 5 jenis
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	64.611.900	64.113.780	498.120	99,23	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 dokumen
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	801.324.700	793.408.270	7.916.430	99,01	Prosentase Kelompok Petani Yang Naik Kelas 8,59%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	801.324.700	793.408.270	7.916.430	99,01	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas 389 kelompok tani
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	356.319.600	352.591.170	3.728.430	98,95	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 16 unit
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	345.085.500	342.621.100	2.464.400	99,29	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 324 unit
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	99.919.600	98.196.000	1.723.600	98,28	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 2 unit

3.4 Inovasi

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki inovasi yaitu :

1. Memiliki sistem yang diberi nama SIMTANI (Sistem Informasi Manajemen Pertanian). SIMTANI sebagai sarana pengelolaan data pertanian dirancang dalam bentuk *web app* yang terintegrasi dengan teknologi geospasial. Alamat websitenya (<http://distan.cirebonkab.go.id/app/>)



Gambar 3.4. Konsep SIMTANI



Gambar 3.5. Aplikasi SIMTANI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2. Menerbitkan regulasi pertanian organik, dan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Pertanian memiliki 1 sasaran strategis, sedangkan urusannya ada dua yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 24.753.164.428 dan terealisasi sebesar Rp22.602.930.287, sisa sebesar Rp 2.150.234.141 atau tercapai sebesar 91,31%. dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp40.149.142.550 dan terealisasi sebesar Rp38.750.956.481 sisa sebesar Rp1.398.186.069 atau tercapai sebesar 96,52%.

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis di Dinas Pertanian untuk meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) memiliki nilai persentase capaian sebesar 79,08% dari target Renstra Tahun 2024 sebesar 588.778 ton, sedangkan realisasinya mencapai 465.621,78 ton.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dinas Pertanian dalam mempertahankan/meningkatkan produksinya di Tahun 2025 melakukan rencana tindak lanjut, antara lain:

- a. Sektor tanaman pangan (beras) untuk mempertahankan produksinya melakukan rencana tindak lanjut yaitu: (1) melakukan penyuluhan ke petani lebih intensif untuk mendorong produksi padi lebih meningkat; (2) pemberian bantuan benih; (3) pengembangan penangkaran benih untuk ketersediaan; (4) memperbaiki prasarana seperti perbaikan irigasi dan penyediaan sarana pertanian sebagai pendukungnya; (5) peningkatan indeks pertanaman (IP).
- b. Sektor tanaman hortikultura dan perkebunan, memiliki 4 komoditas unggulan yaitu:
 - ❖ **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi bawang merah yaitu untuk meningkatkan produksi yaitu petani diberi bantuan berupa pupuk melalui kegiatan petani Champion bawang merah.
 - ❖ **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi cabai besar yaitu (1) dimonitoring secara bertahap sehingga

keberlanjutan komoditas cabai bisa terus berjalan; (2) diberi bantuan pendukung berupa kegiatan P2L yang bertujuan sebagai upaya penanganan inflasi Daerah.

- ❖ **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi mangga yaitu (1) melakukan penangkaran benih dengan tujuan untuk meremajakan pohon-pohon yang sudah tua; (2) pada Tahun 2025 dan 2026 akan diberikan saprodi dikegiatan Upland.
- ❖ **Rencana tindak lanjut** yang dilakukan untuk meningkatkan produksi gula yaitu melakukan penyuluhan dan binaan.

c. Sektor peternakan memiliki 2 komoditas unggulan

- ❖ Pada daging unggas untuk mempertahankan produksinya, perlu dilakukan rencana tindak lanjut berupa (1) melakukan pencegahan untuk unggas lokal dengan melakukan vaksinasi; (2) memfasilitasi bantuan ternak ke Propinsi dan Pusat untuk pembibitan ternak.
- ❖ Pada daging domba untuk meningkatkan produksi dilakukan rencana tindak lanjut berupa melakukan budidaya dengan menerapkan IB supaya untuk memperbaiki keturunan yang dihasilkan lebih berkualitas.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
 Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
 Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

**CATATAN HASIL REVIU
 ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
 TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIREBON**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/675-Sekr tanggal 15 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 4 s/d 26 Maret 2024.

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian
 Nilai Angka Evaluasi AKIP : 71,05
 Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)
 Dengan Catatan sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA	
1.	-
B. PENGUKURAN KINERJA	
2.	Laporan Kinerja telah disusun, namun belum dilengkapi dengan SOP yang menjelaskan mekanisme penyusunan Laporan AKIP
C. PELAPORAN KINERJA	
3.	-
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian, agar :

A. PERENCANAAN KINERJA	
1.	-
B. PENGUKURAN KINERJA	
2.	Membuat SOP yang menjelaskan mekanisme penyusunan Laporan AKIP
C. PELAPORAN KINERJA	
3.	-
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan pernyataan pimpinan bahwa telah direviu secara internal, formulir checklist reviu dan SK Tim Reviu Internal

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



Gambar 2.3. Panen kegiatan SDG



Gambar 2.4. Monitoring pendataan RMU



Gambar 2.5. Sekolah lapangan OPT



Gambar 2.6. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan